

KEBIJAKAN *EXEMPTION OF VISA* OLEH JEPANG TERHADAP INDONESIA PADA ERA SHINZO ABE II

Studi Kasus : Kebijakan Bebas Visa, Jepang

Tamarayani Shierlyana Permatasari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Abstract

The research entitled "The Japanese Exemption of Visa Policy on Indonesia in the Shinzo Abe II Era" aims to find out what is the reason for Prime Minister Shinzo Abe in his second term of office which provides visa-free policies to several countries including Indonesia. Which as we have seen that so far Japan is a country that is very careful in interacting with foreigners with the background of its historical experience as a country adhering to isolationist politics in the Tokugawa Era. But this policy of applying for a visa is an interesting issue to be studied on why Japan imposed a visa-free policy in 2014 for Indonesia. To answer this question, the method used is descriptive analysis method through a qualitative approach. The result obtained in this study is the visa-free policy applied by Japan is one of the effective efforts in obtaining optimal results in the development of the Japanese tourism industry sector with the existence of rational interests owned by Japan. Like the increase in foreign tourists visiting Japan, the increase in income of the Japanese economy through the tourism sector, and strengthen bilateral relations between Japan and Indonesia.

Keywords: *Rational Interest, Bilateral Relations, Japan, Indonesia, Tourism, Visa Waiver Policy.*

Abstrak

Riset dengan judul “Kebijakan *Exemption of Visa* Oleh Jepang Terhadap Indonesia pada Era Shinzo Abe II” bertujuan untuk mengetahui apa alasan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam masa jabatannya yang ke II memberikan kebijakan bebas visa kepada beberapa negara termasuk Indonesia. Yang mana seperti telah kita ketahui bahwa selama ini Jepang adalah negara yang sangat berhati-hati dalam melakukan interaksi dengan orang asing dengan dilatar belakangi oleh pengalaman sejarahnya sebagai negara penganut politik isolasionis di Era Tokugawa. Namun kebijakan penerapan bebas visa ini menjadi satu isu yang menarik untuk dikaji mengenai mengapa Jepang memberlakukan kebijakan bebas visa pada tahun 2014 kepada Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode yang digunakan yaitu metode analisa deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh Jepang merupakan salah satu upaya yang efektif dalam memperoleh hasil yang optimal pada pengembangan sektor industri pariwisata Jepang dengan adanya Kepentingan Rasional yang dimiliki oleh Jepang. Seperti Pertambahan wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang, pertambahan pendapatan ekonomi Jepang melalui sektor pariwisata, dan mempererat hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia.

Kata Kunci : *Kepentingan Rasional, Hubungan Bilateral, Jepang, Indonesia, Pariwisata, Kebijakan *Visa Waiver**

PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Hingga saat ini, Jepang telah mencapai suatu perkembangan yang begitu pesat, yang kemudian menyandang predikat sebagai kekuatan ekonomi di Regional Asia. Negara dengan julukan Negeri Sakura ini memiliki sejarah perkembangan ekonomi yang sangat panjang. Berhasilnya Jepang dalam membangun ekonomi negaranya tidak terlepas dari proses historis negara tersebut, seperti politik isolasi yang mereka terapkan selama kurang lebih 250 tahun.¹ Setelah berakhirnya politik isolasi di Jepang, kemudian muncul suatu gerakan perubahan yang disebut dengan Restorasi Meiji (1868-1885). Restorasi Meiji merupakan sebuah gerakan modernisasi, di mana Negeri Sakura ini melakukan beberapa hal perubahan yang dapat dikatakan cukup mendasar. Karena, dalam pemerintah yang terjadi pada periode Meiji, memberikan banyak pergantian pandangan bagi bangsa Jepang.²

Pada pemerintahan Meiji, bangsa Jepang mulai tertarik untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dan juga memajukan sektor industri negaranya. Tak hanya ekonomi, dalam hal perubahan tersebut Jepang juga melakukan pembaharuan di bidang sosial dan politik. Terdapat adanya penghapusan sistem pangkat feodal, dan perbedaan kasta antara samurai, pedagang, tukang, dan petani, saat berlangsungnya pemberbaharuan bidang sosial dan politik Jepang.

Setelah Jepang berhasil dalam menerapkan gerakan modernisasi, keadaan ekonomi Jepang kembali berubah pasca kekalahannya dalam menghadapi Perang Dunia II. Yang berakibat pada kerusakan fasilitas produksi dan perumahan yang diakibatkan oleh pengeboman, dalam terjadinya perang tersebut Jepang pun kehilangan asset dengan harga kurang lebih ¥ 1,38 triliun pada indeks harga tahun 1947.³

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, juga memaksanya untuk tunduk pada negara yang berkuasa, yaitu Amerika Serikat. Perang Dunia II pun mampu mengakibatkan perubahan orientasi negara Jepang, yang semula kuat dalam militer berubah orientasi menjadi negara *soft power*. Pada saat itu, bangsa Jepang mulai berfikir bagaimana cara untuk membangun kembali negaranya tanpa harus mengusik kekuasaan Barat. Hingga pada akhirnya Jepang memutuskan untuk mulai bangkit dengan melakukan perbaikan ekonomi dan mengesampingkan kekuatan militer yang dimilikinya. Pasca Perang Dunia II juga memunculkan dua doktrin sebagai orientasi kebijakan politik luar negeri Jepang untuk perkembangan selanjutnya. Dua doktrin tersebut yaitu Yoshida dan Fukuda. Kebijakan itu yang kemudian mendorong Jepang menjadi bangsa yang lebih banyak membangun interaksi dengan negara-negara lain. Namun, pada saat itu, Jepang cenderung lebih berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi melalui sektor industri yang telah lama ada dalam membangun kembali perekonomiannya yang pernah jatuh. Hingga lambat laun, mulai muncul suatu ekonomi kreatif Jepang pada sektor Pariwisata.

¹Setyo Adji, Hery. 1997. "Proses Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Historis Komparasi antara Indonesia Dan Jepang". JEP Vol. 2 No. 3

² Ibid,

³Sayidiman, Suryohadiprojo. 1987. "Belajar dari Jepang Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup", UI-PRESS, hal 83

Perkembangan pada sektor pariwisata negara Jepang, sebenarnya sudah mulai terbuka sejak tahun 1867 dengan ditandai oleh datangnya beberapa wisatawan asing ke Jepang, hanya saja dengan keterbatasan tujuan (yang kebanyakan dari mereka datang hanya untuk berdagang). Banyak hal yang melatar belakangi mengapa Jepang mulai tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya yaitu untuk membantu membangun ekonomi domestik Jepang selain dari sektor industri.

Sektor pariwisata sendiri merupakan satu dari sekian banyak bidang yang dapat menopang perekonomian di berbagai negara, salah satunya Jepang. Hal tersebut disebabkan karena sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai *icon* penting yang dimiliki suatu negara dan dirasa dapat menyumbangkan pendapatan perkapita selain yang berasal dari industri dan perdagangan. Adanya sektor pariwisata, bukan hanya perekonomian suatu negara saja yang terbantu, namun pariwisata juga memiliki peran yang dapat membantu meningkatkan integrasi sekaligus merekatkan hubungan antar bangsa. Pasca Perang Dunia II, Jepang mulai terbuka dan tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisatanya yang disebabkan oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Namun, sektor pariwisata Jepang pada saat itu dinilai masih sangat minim wisatawan asing yang berkunjung, terbukti pada data yang ada di *Japan National Tourism Organization* mulai dari tahun 1964 terdapat 352.832 orang yang berkunjung ke Jepang, lalu tahun 1980 terdapat 1.316.632 orang dan tahun 1990 terdapat 3.235.860 orang yang berkunjung ke Jepang.⁴

⁴JNTO Japan National Tourism Organisation. "Japan Tourism Statistic" diakses di <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph-->

Meski telah terdapat adanya penambahan jumlah kunjungan, namun pada tahun 1980 sampai 1990an, Negeri Sakura ini masih tercatat sebagai negara yang hanya aktif dalam menyumbangkan angka wisatawan ke negara lain. Negara Jepang dirasa lebih dominan dalam menerapkan *Outbond Tourism* dan memandang sebelah mata pada sektor pariwisata. Dengan alasan bahwa mereka menilai sektor industri dan perdagangan masih sangat berperan besar dalam kemajuan perekonomian Jepang dibandingkan sektor pariwisatanya.⁵

Seiring berjalannya waktu, Negeri Sakura ini mulai tertarik untuk mengembangkan *Inbound Tourism*. Di mana pada Desember 2002, Perdana Menteri Koizumi menerapkan *The Inbound Tourism Initiative of Japan* yang berisikan mengenai berbagai rencana besar Jepang di sektor pariwisata, yang dapat mempermudah wisatawan asing untuk berkunjung. Pada tahun 2003, dengan munculnya "*Visit Japan*" menjadi salah satu bidang kampanye yang dilakukan untuk promosi di berbagai negara. Hal tersebut merupakan suatu penanda bahwa sektor pariwisata negara Jepang mulai berkembang. Kebijakan *Inbound Tourism* sendiri dalam kiprahnya selalu menunjukkan perkembangan hingga pemerintahan Shinzo Abe. Pada tahun 2012, Shinzo Abe terpilih kembali menjadi Perdana Menteri terpercaya di Jepang. Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri yang memiliki peran penting dalam melakukan perubahan terhadap

inbound--travelers--transition pada tanggal 27 oktober 2018

⁵"1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pariwisata di Jepang-ETD UGM" (SKRIPSI) diakses di <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/111474/potongan/S1-2017-335714-introduction.pdf> pada 28 mei 2018

kemajuan pariwisata Jepang.⁶ Salah satu kebijakan Jepang dalam perkembangan bidang pariwisata pada Era Perdana Menteri Shinzo Abe adalah *Exemption of visa* (EOV).

Di samping itu, Jepang juga mulai melakukan berbagai aliansi dengan negara-negara lain salah satunya Indonesia. Pada tahun 1958 tepatnya pada bulan April menjadi suatu bulan bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan Jepang.⁷ Di mana pada saat itu dimulailah hubungan bilateral antar keduanya dengan ditandai oleh Penandatanganan Perjanjian dan Pampasan Perang. Selanjutnya pada tahun 1963 mulai dibuka jalur penerbangan antara Jepang dengan Indonesia. Jepang dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki hubungan bilateral sangat baik. Dalam sejarahnya, mereka memiliki hubungan kerjasama di berbagai sektor. Salah satunya yaitu perekonomian. Pada sektor ekonomi, Jepang dan Indonesia menitik beratkan pada bidang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi. Untuk sektor perdagangan, Indonesia merupakan penyumbang surplus besar impor ke Jepang berkisar US \$ 6.5 miliar (tahun 2007). Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, tekstil dan produk tekstil, mesin, dan perlengkapan listrik. Selain itu, dalam bidang investasi terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia. Sementara pada kerjasama ekonomi,

Jepang merupakan negara penyumbang ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar untuk Indonesia. Relasi bantuan untuk tahun 2006 yaitu pinjaman ¥ 125.2 miliar, bantuan hibah ¥ 5,4 miliar, kerjasama teknik ¥ 7,8 miliar.⁸

Lambat laun, Hubungan bilateral antara negara Jepang dengan Indonesia pun semakin menunjukkan suatu perkembangan. Seperti pada bidang sosial-budaya, yang mengakibatkan tercetusnya kerjasama di bidang pariwisata. Pada bidang pariwisata, hubungan antar keduanya mulai terjalin sejak tahun 2003, ketika Presiden Republik Indonesia, Ibu Mega Wati Soekarno Puteri berkunjung ke Jepang dan melakukan penandatanganan perjanjian antar kedua negara.⁹ Hingga Jepang kemudian memberikan beberapa kemudahan untuk warga negara Indonesia yang ingin berkunjung. Seperti penerapan kebijakan *Exemption Of Visa*. *Exemption of visa* sendiri merupakan suatu kebijakan bebas visa yang diinisiasi oleh Shinzo Abe pada periode II ia menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Kebijakan bebas visa tersebut secara resmi pertama kali diberlakukan pada 1 Juli 2013 terhadap Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand merupakan dua negara pertama ASEAN yang mendapatkan kebijakan bebas visa kunjungan ke Jepang. Bebas visa untuk negara Thailand sendiri berlaku untuk masa tinggal kurang dari 15 hari, sementara itu

⁶ Ibid,

⁷ Al Jamil, Aditya. 2014. "Motivasi Pemerintah Jepang dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia". JOM FISIP, Vol.2 No.2

⁸ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, "Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang" diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html pada 13 september 2018

⁹ Tempo.co "Indonesia-Jepang Tandatangani Kerjasama Pariwisata" diakses di <https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata/full?view=ok> pada 29 Januari 2019

untuk negara Malaysia berlaku untuk kunjungan kurang dari 3 bulan.¹⁰

Tidak lama kemudian, Menlu Jepang Fumio Kishida mengumumkan bahwa bebas visa kunjungan sementara untuk WNI ke Jepang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2014.¹¹ Dari adanya pemberlakuan bebas visa tersebut akan mempermudah WNI untuk berkunjung ke Jepang. Bebas visa kunjungan ini berlaku kurang dari 15 hari dan khusus untuk tujuan berkunjung atau wisata.

Pemberian bebas visa memiliki suatu ketentuan di dalamnya. Di mana bebas visa ke Jepang dapat diterapkan atau digunakan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki *IC Passport/e-passport* (passport dengan logo chip di bagian sampul depan) sesuai dengan standar ICAO (*International Civil Aviation Organization*), dan telah melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang / Konsulat Jendral Jepang/ Kantor Konsulat Jepang) atau JVAC di Indonesia sebelum keberangkatan.¹²

Hal tersebut tentu bukanlah syarat yang sulit untuk didapatkan oleh Warga Negara Indonesia, karena badan Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan dua jenis paspor, yaitu

paspor biasa dan paspor elektronik. Terdapat perbedaan dari paspor biasa dengan paspor elektronik, seperti dalam bentuk fisiknya hanya terletak pada logo chip di bagian depan paspor. Namun dalam chip yang terdapat di e-paspor tersimpan informasi awal dari seorang WNI yang akan masuk ke wilayah Jepang dalam perekaman data biometrik, dan itu berfungsi sebagai pengganti proses aplikasi visa.¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut memunculkan suatu pertanyaan yang menarik untuk dipecahkan yaitu mengenai apa alasan Jepang atau mengapa Jepang memberikan kebijakan *Exemption of Visa* pada negara Indonesia yang secara resmi diberlakukan pada Era Perdana Menteri Shinzo Abe II tepatnya pada Desember 2014.

KERANGKA BERFIKIR

Maksud dan tujuan negara Jepang memberikan kebijakan *Visa Waiver* atau pembebasan Visa bagi negara Indonesia, dapat di analisis dengan menggunakan model Pembuatan Keputusan. Dalam model pembuatan keputusan, teoritis hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T.Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu *Aktor Rasional, Proses Organisasi, dan Politik Birokratis*. Namun, pemberian Kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh Jepang dianalisis dengan menggunakan teori,

¹⁰Kompas. 2013. "Bebas Visa Jepang untuk Thailand dan Malaysia, Bukan Indonesia" diakses di

<https://travel.kompas.com/read/2013/06/27/1527262/Bebas.Visa.Jepang.untuk.Thailand.dan.Malaysia>. Bukan.Indonesia pada 15 September 2018

¹¹"Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia", diakses di

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/informasi-penting/Pages/Bebas-Visa-ke-Jepang-Berlaku-Efektif-1-Desember-Ini.aspx> pada 15 september 2018

¹²"Bebas Visa dengan Sistem Registrasi Pra-keberangkatan bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspor" diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_waiver2018.html pada 28 November 2018

¹³Nusantara, Gelora. 2015. "Belajar dari Penerapan Bebas Visa Jepang bagi Warga Negara Indonesia" diakses di <https://www.kompasiana.com/genusa/552c240b6ea834495f8b4605/belajar-dari-penerapan-bvks-jepang-bagi-warga-negara-indonesia> pada 28 November 2018

1. Aktor Rasional

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dari situ, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas alternative tersebut.¹⁴

Berdasarkan model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas beberapa alternative, para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan digambarkan sebagai orang yang selalu siap untuk melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya dalam menetapkan pilihan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.¹⁵

Model aktor rasional cenderung dipilih oleh penulis daripada dua model lain (proses organisasi dan politik birokratis, karena dalam keadaan Jepang saat munculnya kekuatan-kekuatan industri baru, pemerintah Jepang merupakan suatu aktor yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan luar negeri untuk segera mengatasi permasalahan yang terjadi demi kepentingan nasional Jepang sendiri. Pembahasan masalah dengan menggunakan

birokrasi politik atau organisasi internasional dirasa akan memperlama waktu pengambilan keputusan dan tindakan. Pada model ini pembuat keputusan atau pemerintah Jepang dianggap rasional dan umumnya berfikir keputusan memang dibuat secara rasional.

2. Games Theory

Dalam upaya memahami perilaku negara atau para pembuat keputusan politik luar negeri dalam situasi konflik internasional, para ilmuwan hubungan internasional menerapkan metafora permainan atau *game*. Hubungan antar negara yang bersifat kompetitif atau konfliktual digambarkan seolah-olah seperti seseorang yang sedang bermain catur, poker, bridge atau permainan semacam itu yang lain. Model yang sering disebut *Game Theory* ini menggambarkan bagai mana proses penalaran berlangsung dalam pembuatan keputusan. Asumsi utama yang melandasi model ini adalah bahwa para pemain berperilaku Rasional, yaitu memilih strategi atas dasar pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas, namun pada umumnya perilaku dalam proses tersebut dianggap bersifat rasional. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa para aktor itu dianggap punya kemampuan untuk mengetahui semua kemungkinan situasi yang dihadapi, untuk menjabarkan urutan-urutan prioritas tujuan yang hendak dicapai. Asumsi kedua adalah bahwa para pemain yang berhadapan hadapan memiliki kepentingan yang bertentangan, walaupun hanya sebagian. Jika kepentingan mereka selaras, maka seorang pemain akan bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.¹⁶

¹⁴ Mas'ood Mochtar. 1990. "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*" (Jakarta: PT. Ikar Mandiriabadi, hal 275-276.

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Id, at 11

Table 1 Analisis Pemberian Kebijakan Bebas Visa Kepada Indonesia

Indikator	Memberikan Bebas Visa kepada Indonesia		Tidak Memberikan Bebas Visa kepada Indonesia	
	Untung	Rugi	Untung	Rugi
Sektor Pariwisata	Menambah wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang Membuka kesempatan wisatawan untuk lebih mengenal Jepang	Terdapat beberapa Wisatawan Asing yang menyalahgunakan visa tidak untuk berwisata namun untuk keperluan mencari kerja.	Ketatnya pengurusan Visa membuat tidak banyak warga negara asing yang mudah keluar masuk Jepang sehingga tidak banyak pula budaya asing yang masuk	Minimnya penambahan wisatawan asal negara Indonesia yang berkunjung ke Jepang karena sulitnya mengurus visa kunjungan
Sektor Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Perkapita negara Jepang	Tidak ditemukan kerugian	Tidak ditemukan keuntungan	Minimnya pendapatan oleh Jepang yang diakibatkan tidak adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung
Aliansi	Semakin mempererat hubungan antar kedua negara	Tidak ditemukan suatu bentuk kerugian	Tidak adanya keuntungan dalam hal tersebut	Kemungkinan peningkatan hubungan kerjasama antar keduanya menjadi biasa
Karakter dari Masyarakat Jepang	Semakin dikenalnya karakter asli dari masyarakat Jepang	Terdapat berbagai budaya asing yang masuk dengan mudah dan bisa saja mempengaruhi karakter asli masyarakat Jepang.	Terdapat kemungkinan besar terjaganya karakter bangsa Jepang	Tidak terdapat kerugian yang signifikan.

Dari analisis sementara data tersebut, terlihat jelas bahwa memberikan kebijakan Bebas Visa kepada Warga Negara Indonesia lebih cenderung menguntungkan bagi Jepang dari pada tidak sama sekali. Meski dengan adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa, Jepang mengalami suatu dilema akan karakteristik masyarakatnya yang dapat dipengaruhi oleh negara luar yang masuk ke Jepang, namun dengan diberlakukannya kebijakan Bebas Visa ini lebih memberikan tambahan keuntungan dibanding kerugiannya untuk Jepang dalam berbagai sektor yang ada.

Alasan Jepang Memberikan Kebijakan Bebas Visa Kepada Indonesia pada Tahun 2014

Bebas visa merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Jepang terhadap Indonesia. Dalam upaya mengoptimalkan hasil, berbagai cara telah dilakukan oleh Jepang, termasuk dengan dimunculkannya suatu ekonomi kreatif Jepang, yang dapat membantu mengembangkan ekonomi domestik yang mengalami deflasi. Ekonomi kreatif tersebut adalah sektor pariwisata. Jepang sendiri sebagai negara yang berlatar belakang penganut politik isolasionis, segera melakukan sebuah pemberbaruan negaranya yang disebabkan oleh adanya tuntutan global. Pariwisata dinilai Jepang, sebagai sebuah alternative baru yang dapat menunjang inovasi-inovasi pengembangan ekonomi Jepang selain sektor industrinya yang telah lama ada. Kebijakan-kebijakan baru pun telah Jepang inisiasi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata negaranya, yang salah satunya adalah kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2014.

A. Penambahan Jumlah Total Wisatawan Asing dan Indonesia yang Berkunjung ke Jepang

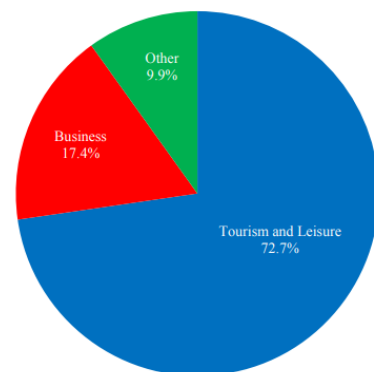
Pada penerapan upaya Jepang untuk mendapatkan pertambahan kunjungan wisatawan asing, kebijakan bebas visa pun teretus dalam sebuah kebijakan pariwisata yang tertuang dalam agenda besar *Abenomic Growth Strategy*. Di dalam kebijakan tersebut, Jepang pun berambisi untuk dapat menarik wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang sebesar 20 juta pada tahun 2020 dan 30 juta pada tahun 2030. Untuk dapat merealisasikan ambisi tersebut Jepang mulai melakukan beberapa inovasi dan berbagai

upaya yang salah satunya yaitu dengan pemberian kebijakan bebas visa untuk

beberapa negara termasuk Indonesia. Kebijakan bebas visa dirasa merupakan sebuah usaha yang dapat mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh Jepang nantinya, seperti adanya penambahan wisatawan asing yang berkunjung ke sana.

Usaha yang dilakukan Jepang dari penerapan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia, dapat dilihat hasilnya, dengan adanya penambahan jumlah pengunjung yang sangat signifikan. Warga Negara Indoneisa pun merespon kebijakan bebas visa tersbut dengan sangat positif. Sebelum tahun 2020, Jepang pun mampu melampaui target 20 juta warga negara asing yang berkunjung ke Jepang. Datangnya warga negara asing tersebut dengan berbagai macam tujuan, namun tujuan yang mendominasi kedatangan para wisatawan asing adalah untuk tujuan rekreasi. Tercatat sebanyak 72,7% warga negara asing yang datang ke Jepang untuk tujuan wisata atau hanya sekedar menghabiskan waktu luang, seperti pengelompokan di bawah ini.

Gambar 1 Pengelompokan Tujuan Wisatawan Asing Berkunjung ke Jepang

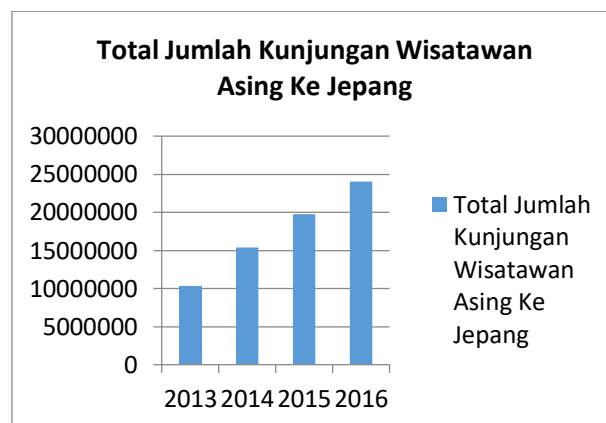


Source: Consumption Trend Survey for Foreigners Visiting Japan (JTA)

Dimulai dari tahun 2013, pada *Japan National Tourism Organization*, tercatat sebanyak 10.365.904 juta total warga negara asing yang datang ke

Jepang. Untuk benua Asia sendiri, menyumbangkan angka terbesar yaitu 8.115.789 juta, dengan negara Indonesia sebesar 136.797 orang yang berkunjung.¹⁷ Setelah satu tahun kemudian, jumlah pengunjung dari warga negara asing ke Jepang pun bertambah hingga 15.415.467 juta dengan penyumbang terbesar masih Asia, sebanyak 10.819.211 juta dengan Indonesia di dalamnya bertambah menjadi 158.739.¹⁸ Pada tahun 2015, kelonjakan pengunjung warga negara asing ke Jepang pun bertambah lagi hingga 19.757.409 juta, dengan warga negara asing yang berasal dari Asia mencapai 16.645.843 juta pengunjung, dengan penambahan dari warga negara Indonesia setelah adanya pembebasan visa pada tahun 2014, bertambah menjadi 205.083.¹⁹ Hingga pada tahun 2016, total keseluruhan warga negara asing yang berkunjung ke Jepang mampu melampaui target yaitu sebesar 24.039.700 juta orang yang berkunjung ke Jepang, dengan penambahan warga negara Indonesia menjadi 271.014.

Grafik 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing ke Jepang



Sumber: *JNTO*

Grafik 2 Jumlah Kunjungan Warga Negara Indonesia ke Jepang



Sumber : *JNTO*

Dalam table di atas, tertera dengan jelas bahwa tahun demi tahun warga negara asing yang berkunjung ke Jepang mengalami peningkatan yang signifikan. Pengunjung dari warga negara Indonesia sendiri tercatat adanya penambahan kunjungan dari tahun 2013-2014 bertambah 21.942 orang, kemudian hingga setelah pembebasan visa tahun 2015-2016 bertambah sebanyak 65.931 orang. Dengan adanya penambahan kunjungan warga negara asing ke Jepang tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut berdampak pula pada pendapatan ekonomi Jepang yang ikut bertambah.

¹⁷“Foreign Visitors to Japan 2013”, diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2013.pdf> pada 17 Februari 2019

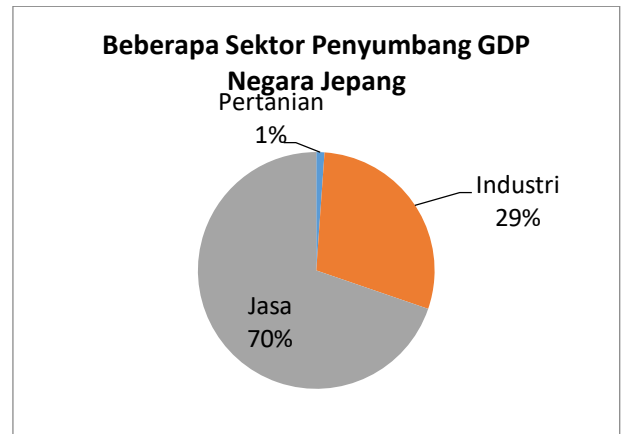
¹⁸“Foreign Visitors to Japan 2014”, diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2014.pdf> pada 17 Februari 2019

¹⁹“Foreign Visitors to Japan 2015”, diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2016.pdf> pada 17 Februari 2019

B. Peningkatan Keuntungan Ekonomi Jepang dari Sektor Pariwisata

Keuntungan ekonomi merupakan salah satu alasan rasional Jepang ketika memberlakukan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Dengan bertambahnya kunjungan warga negara asing ke Jepang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pertambahan pendapatan negara Jepang untuk GDP. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama kurun waktu satu tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.²⁰ Dalam perkembangan ekonomi Jepang, tercatat ada beberapa sektor yang turut membantu pemasukan GDP domestik, di antaranya sektor Industri, Pertanian, dan Jasa sebagai berikut.²¹

Gambar 2 Sektor Penyumbang GDP Negara Jepang (2015)



Sumber :

<https://www.statista.com/statistics/270093/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-japan/>

Dalam diagram yang ada di atas, terdapat bermacam sektor yang menyumbangkan pendapatan untuk GDP Jepang. Di samping itu terdapat pula adanya sektor pariwisata yang ikut berkontribusi menyumbangkan hasilnya untuk pendapatan perkapita, yaitu sebesar 2,4% dari GDP. Meski tidak terlalu besar, namun hasil tersebut cukup berpengaruh untuk menambah pendapatan domestik negara Jepang. Hasil dari sektor pariwisata sendiri, setiap tahun mengalami suatu peningkatan, apalagi dengan adanya bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara termasuk Indonesia. Berikut adalah rekapitan mengenai kontribusi langsung yang diberikan oleh travel dan wisatawan terhadap GDP di Jepang. Pada tahun 2014, tercatat sebesar ¥ 11.487 miliar, kemudian bertambah lagi pada tahun 2015 menjadi ¥ 11,921 miliar, ditahun 2016 tercatat sebanyak ¥ 12,013 miliar. Kemudian pendapatan tersebut meningkat kembali pada pencapaian ¥ 12,317 miliar tahun 2017.²² Hal itu tercermin pada aktifitas

²⁰ Tri Basuki, Agus; Prawoto Nano. 2015. "Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro", Yogyakarta Danisa Media

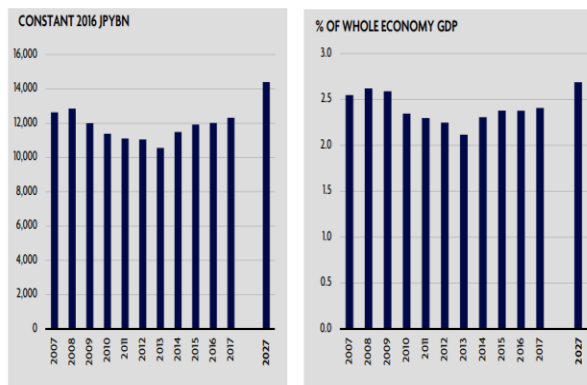
²¹ "Japan: Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors from 2006 to 2016" diakses di <https://www.statista.com/statistics/270093/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-japan/> pada 17 Februari 2019

²² "Travel & Tourism Economic Impact 2017" diakses di <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact->

ekonomi yang dihasilkan oleh industri pariwisata diantaranya hotel, agen, perjalanan, maskapai penerbangan, dan transportasi lain yang dipergunakan di Jepang. pendapatan tersebut diperkirakan akan terus bertambah untuk tahun-tahun yang akan datang dengan perkiraan 1,6% pertambahan pertahun menjadi ¥ 14,405,5 miliar.

Grafik 3 Kontribusi Travel dan Wisatawan Asing untuk GDP Jepang

JAPAN: DIRECT CONTRIBUTION OF TRAVEL & TOURISM TO GDP

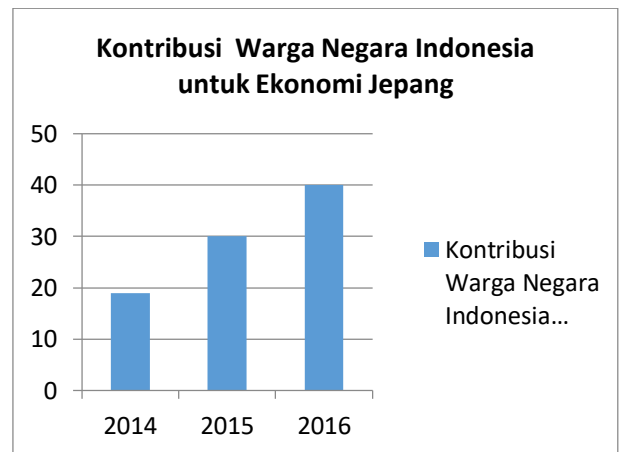


Dalam table di atas, cukup jelas mengenai peningkatan kontribusi sektor pariwisata Jepang terhadap GDP negara Jepang itu sendiri. Meski presentase sumbangan sektor pariwisata dapat terbilang cukup kecil, namun pengaruh yang diberikan untuk penambahan pendapatan negara Jepang dapat dikatakan lumayan hasilnya. Dengan diberlakukan bebas visa oleh Jepang kepada Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa warga negara Indonesia sendiri ikut berperan dalam penambahan pendapatan ekonomi Jepang. Yangmana, kedatangan warga negara Indonesia tercatat sebagai peringkat 11 dalam menyumbangkan *Inbound Tourism* diantara negara-negara yang berkunjung ke Jepang.

research/countries-2017/japan2017.pdf pada 17 Februari 2019

Untuk kalkulasi biaya warga negara Indonesia sendiri yang datang ke Jepang, menghabiskan sekitar ¥ 19,0 miliar per tahun 2014.²³ Kemudian bertambah lagi tahun 2015 menjadi ¥ 30,2 miliar, setelah diadakannya bebas visa.²⁴ Dan pada 2016, warga negara Indonesia pun menghabiskan sebanyak ¥ 37,0 miliar di Jepang.²⁵ Hasil tersebut di dalamnya termasuk dalam konsumsi makanan, minuman, souvenir yang dijual belikan di Jepang. Seperti table di bawah ini, yang akan memperjelas kenaikan yang signifikan mengenai jumlah uang yang dihabiskan warga negara Indonesia di Jepang.²⁶ (Dalam satuan Miliar Yen)

Grafik 4 Kontribusi Warga Negara Indonesia untuk Ekonomi Jepang



Sumber : *Japan Tourism Agency*

Adanya bebas visa yang di berikan kepada Indonesia oleh Jepang,

²³“*Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2014*” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001211777.pdf> pada 19 Februari 2019

²⁴“*Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2015*” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001141408.pdf> pada 19 Februari 2019

²⁵“*Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2016*” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001255530.pdf> pada 19 Februari 2019

²⁶“*Japan Tourism Agency*” diakses di <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryu/whitepaper.html> pada 19 Februari 2019

membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para warga negara Indonesia yang ingin menghabiskan waktu liburnya ke sana. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu penambahan pendapatan dalam ekonomi domestik Jepang. Mengingat bahwa seseorang yang pergi ke negara luar tidak mungkin jika mereka tidak menghabiskan uang mereka untuk berbelanja sesuatu.

C. Mempererat Hubungan Bilateral Negara Jepang dan Indonesia

Pada dasarnya sektor pariwisata merupakan sebuah bentuk dari kerjasama sosial budaya antara Jepang dan Indonesia. Namun, industri pariwisata lambat laun semakin menunjukkan sebuah kemajuan yang pesat dalam perkembangannya, hingga mampu berdiri sendiri. Jepang merupakan salah satu negara yang mulai aktif dalam menerapkan *Inbound Tourism*. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, Jepang melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemberian kebijakan bebas visa oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Hal yang menjadikan alasan pemberian kebijakan bebas visa tersebut tidak semata-mata hanyalah berkontribusi pada pendapatan ekonomi saja. Melainkan, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut ternyata mampu untuk menambah kedekatan antara negara pemberi kebijakan dengan negara penerima, seperti hubungan resiprokal yang diberikan oleh Indonesia untuk Jepang yang juga memberikan kebijakan bebas visa, namun pemberian kebijakan bebas visa yang semula hanya untuk tujuan wisata, ternyata hal tersebut dapat menjadi intensif kerjasama dua negara. Contohnya yaitu kerjasama dalam bidang Irigasi yang dilakukan Jepang di Indonesia.

Dengan Jepang memberlakukan kebijakan bebas visa terhadap

Indonesia, Pemerintah Indonesia pun memberi respon positif. Yang mana pada 12 Juni 2015, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dengan resmi memberlakukan kebijakan bebas visa kepada 45 negara yang didalamnya termasuk negara Jepang. Berikut adalah daftar 45 negara tersebut.²⁷

Table 2 Daftar 45 Negara Penerima Bebas Visa ke Indonesia Tahun 2015

1. Tiongkok	24. Ceko
2. Rusia	25. Qatar
3. Korea Selatan	26. Arab
4. Jepang	27. Kuwait
5. Amerika	28. Bahrain
6. Selandia Baru	29. Oman
7. Meksiko	30. Afrika Selatan
8. Inggris	31. Thailand
9. Jerman	32. Malaysia
10. Prancis	33. Singapura
11. Belanda	34. Brunei
12. Italia	35. Filipina
13. Kanada	36. Chili
14. Spanyol	37. Maroko
15. Swiss	38. Peru
16. Belgia	39. Vietnam
17. Swedia	40. Ekuador
18. Austria	41. Kamboja
19. Denmark	42. Laos
20. Norwegia	43. Myanmar
21. Finlandia	44. Hongkong
22. Polandia	45. Makao
23. Hungaria	

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.²⁸ Pemberlakuan kebijakan

²⁷ Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakses di <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita-utama/754-ini-45-negara-yang-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia> pada 23 Februari 2019

²⁸Pratama Fajar. 2015. "Indonesia Berikan Bebas Visa Kunjungan ke 45 Negara ini" diakses di <https://m.detik.com/news/berita/2940933/indonesia-berikan-bebas-visa-kunjungan-ke-45-negara-ini?9922022> pada 23 Februari 2019

bebas visa tersebut juga sebagai bentuk upaya Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama negara Republik Indonesia dengan negara-negara penerima kebijakan, terutama negara Jepang yang telah memberikan kebijakan bebas visa terlebih dahulu pada Desember 2014 silam untuk Indonesia.

Dimulai pada pertemuan antara Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia, Toshihiro Nikai dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla pada bulan Mei 2015. Di mana Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia tersebut meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikan kebijakan bebas visa untuk masyarakat Jepang, yang mana Jepang sendiri telah memberikan kebijakan bebas visa terlebih dahulu untuk warga negara Indonesia yang berkunjung ke Jepang pada 2014 lalu. Permintaan tersebut juga didasari oleh rencana yang telah dirancang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada bulan Maret 2015, yang membahas mengenai pemberian kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Jepang.²⁹

Dalam penerapan kebijakan bebas visa Indonesia untuk negara Jepang, terdapat beberapa syarat di dalamnya, diantaranya kepemilikan paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; tidak termasuk dalam daftar penangkalan; bebas visa diberlakukan untuk kunjungan wisata, sosial, kunjungan keluarga, dan lain-lain, yang kegiatan tersebut tidak lebih dari 30 hari masa tinggal di Indonesia, terhitung sejak tanggal tanda masuk diterapkan dan kunjungan dengan bebas visa tidak dapat diperpanjang.³⁰ Hingga tahun

2016 pun kebijakan tersebut bertambah menjadi 169 negara yang dibebaskan.³¹

Dengan penerapan kebijakan bebas visa tersebut dapat dijadikan sebuah tanda bahwa adanya pereratan mengenai kedekatan antara Jepang dan Indonesia. Penerapan kebijakan bebas visa dari Jepang untuk Indonesia pun nyatanya dapat menjadi sebuah jembatan akan kedekatan hubungan bilateral antar kedua negara, yang mana setelah pembebasan visa dari Jepang, Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan memberikan kebijakan bebas visa pula kepada negara Jepang. Dengan begitu terdapat suatu kemudahan juga terhadap mobilitas orang Jepang yang datang ke Indonesia atau sebaliknya. Karena setelah adanya kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh kedua negara tersebut, terdapat adanya suatu perayaan dengan kehadiran 1100 Duta Sipil Jepang ke Indonesia yang diketuai oleh Liga Parlemen Indonesia-Jepang Toshihiro Nikai. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo percaya bahwa kunjungan tersebut akan memperkuat persahabatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi untuk Jepang dan Indonesia kedepannya.³² Kedatangan para Duta Sipil tersebut selain untuk merayakan kebijakan bebas visa antara kedua negara juga terdapat adanya beberapa kerjasama baru yang teretus salah satunya dalam bidang teknologi irigasi.³³

<https://ngurahrai.imigrasi.go.id/read/bebas-visa-kunjungan-pada-23-februari-2019>

²⁹Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia” diakses di <https://www.kemlu.go.id/beijing/Layanan%20Visa/Bebas%20Visa%20Kunjungan.pdf> pada 23 Februari 2019

³²Armenia Resty. 2015. “Jokowi Temui 1.000 Turis Jepang” diakses di <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20151123204516-20-93583/jokowi-temui-1000-turis-jepang> pada 23 Februari 2019

³³Agustinus, Michael. 2015. “1.100 Pengusaha Jepang Sambangi Jokowi, BKPM Bukti RI Mitra Penting” diakses di

²⁹Rastika Icha. 2015. ”Juni WN Jepang Bebas Visa ke Indonesia” diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/14434711/Juni.WN.Jepang.Bebas.Visa.ke.Indonesia> pada 23 Februari 2019

³⁰“Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai”, diakses di

Bidang teknologi irigasi merupakan salah satu kerjasama yang ditingkatkan Jepang dengan Indonesia setelah pembebasan visa. Hubungan itu bermula ketika negara Jepang melalui delegasi yang dipimpin oleh Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia Toshihiro Nikai menyampaikan tawarannya kepada Presiden Joko Widodo. Hubungan itu tergabung dalam kerjasama pembuatan teknologi irigasi.³⁴ Kerjasama pembuatan teknologi irigasi meningkat dirasa ada keterkaitannya dengan diberlakukan kebijakan bebas visa antar kedua negara. Dengan adanya bebas visa itu dapat memudahkan mobilitas orang Jepang yang datang ke Indonesia tidak hanya berwisata namun juga untuk keperluan bisnis. Kerjasama di bidang teknologi irigasi kemudian ditindak lanjuti dengan hadirnya Perdana Menteri Shinzo Abe ke Indonesia. Dalam pertemuan itu, Shinzo Abe mengaku bahwa akan mengalokasikan dana kurang lebih sebesar ¥ 74 miliar untuk bisnis tersebut.³⁵ Peningkatan kerjasama pembuatan teknologi irigasi yang disepakati oleh Jepang maupun Indonesia terjalin sejak tahun 2015, namun dana untuk kerjasama tersebut terealisasi pada tahun 2017 dengan ditandai oleh kehadiran Perdana Menteri Shinzo Abe ke Istana Bogor.³⁶ Sektor teknologi irigasi dipilih karena belum banyak tersentuh oleh investor Jepang.

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3078925/1100-pengusaha-jepang-sambangi-jokowi-bkpm-bukti-ri-mitra-penting> pada 23 Februari 2019

³⁴Masrifah Harmayani, Alviana. 2015. "*Jepang Tawarkan RI Kerja Sama Pariwisata-Pertanian*" diakses di <https://ekbis.sindonews.com/read/1063925/34/jepang-tawarkan-ri-kerja-sama-pariwisata-pertanian-1448292542> pada 2 Februari 2019

³⁵Stefanie, Christie. 2017. "*Jepang Kucurkan 74 Miliar Yen Untuk Irigasi dan Konservasi*", 2017 diakses di <https://m.ccnindonesia.com/nasional/20170115204959-20-186447/jepang-kucurkan-74-miliar-yen-untuk-irigasi-dan-konservasi> pada 2 Februari 2019

³⁶ Ibid,

Minat investasi tersebut dalam data BKPM yang disampaikan oleh Franky Sibarani (Kepala BKPM) tercatat hanya sebesar US \$ 41 Juta pada tahun 2014-2015³⁷ hingga pada tahun 2017 Jepang pun mengalokasikan dananya hingga US \$ 660 Juta untuk irigasi yang terbagi juga pada bidang konservasi. Hal tersebut merupakan salah satu peningkatan hubungan Jepang dengan Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa. Peningkatan kerjasama itu juga didorong oleh Toshihiro Nikai, di mana ia sangat berperan dalam peningkatan hubungan kerjasama Jepang dengan Indonesia, termasuk dalam pemberian kebijakan bebas visa pada tahun 2014 kepada Indonesia.

KESIMPULAN

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur, yang saat ini tercatat sebagai negara penyandang predikat kekuatan ekonomi di Regional Asia. Namun sebelum itu, Jepang sangat terkenal akan politik isolasinya. Selama kurang lebih 250 tahun kekuasaan Shogunat Tokugawa mengisolasi interaksinya dengan bangsa-bangsa lain. Hanya kepulauan Okinawa pada saat itu yang mendapat izin melakukan interaksi dengan dunia luar, namun dengan akses yang masih dibatasi oleh Tokugawa. Selama berjalannya sistem isolasionis, masyarakat Jepang dilarang melakukan perjalanan ke Luar Negeri dan melakukan hubungan dagang dengan negara luar, karena banyak hal yang muncul dan dinilai bertolak belakang dengan feodal yang dianut rakyat Jepang pada saat itu. Lambat laun, politik isolasi yang diterapkan oleh negara Jepang tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah

³⁷Praditya Istianur, Ilyas. 2015. "*Jepang Tawarkan Kerja Sama Pertanian ke RI*" diakses di <https://m.liputan6.com/amp/2373399/jepang-tawarkan-kerja-sama-pertanian-ke-ri> pada 2 Februari 2019

satunya muncul berbagai teknologi baru oleh negara-negara Barat, dan datangnya Komodor Perry pelaut Amerika Serikat dan Townsen Haris yang memaksa Tokugawa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Kejadian itu menuai kekhawatiran para bangsa Jepang, jika suatu saat nanti Jepang dapat dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat, hal itu yang kemudian digunakan oleh beberapa daimyo yang berani melawan kekuasaan Tokugawa untuk menjatuhkannya.

Dengan Jatuhnya kekuasaan Tokugawa, pada 1868 muncullah sebuah gerakan perubahan yang di sebut dengan Restorasi Meiji. Dalam Restorasi Meiji, banyak sekali perubahan yang dialami oleh negeri Sakura tersebut. Pada saat itu, terdapat berbagai budaya asing yang mulai masuk ke Jepang, seperti *westernisasi* yang merupakan pengadopsian dari budaya-budaya Barat. Pada saat berlangsungnya Meiji, Jepang bersemboyan pada "*Fukoku Kyohei*" yang berarti negara sejahtera dan memiliki tentara kuat, dengan begitu Jepang mulai percaya pada kekuatan sendiri. Restorasi Meiji berdampak pula pada hubungan luar negeri Jepang, bawasannya Jepang yang semula adalah negara isolasi, menjadi negara yang *Open Door Policy*, hingga terdapat pula suatu perkembangan ekonomi yang dirintis Jepang pada sektor industrinya.

Namun perkembangan ekonomi Jepang berubah kembali ketika kekalahannya pada Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II, mengakibatkan banyak sekali kerusakan terhadap infrastruktur dan perumahan di Jepang sehingga merekapun kehilangan beberapa Asset yang dimiliki. Jepang terpaksa harus tunduk pada negara yang berkuasa yaitu Amerika Serikat, selain itu Jepang juga harus melakukan reparasi perang, di mana Jepang dapat membangun negaranya yang runtuh hanya dengan mengembangkan perekonomian tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Pengembangan ekonomi Jepang pun tertuju pada penguatan sektor

industrialisasi yang ia miliki. Namun Jepang masih berambisi mencari berbagai alternative untuk dapat menambah pemasukan ekonomi domestik disamping sektor industri. Hingga tercetus suatu ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata, kemudian Jepang mulai memperbaiki sarana umum domestiknya. Di samping itu, terdapat dua doktrin dalam kebijakan luar negeri Jepang. Yaitu Yoshida Doktrin, (yang menerapkan kebijakan luar negeri Jepang dengan mengarah pada diplomasi ekonomi), dan Fukuda Doktrine, (membahas mengenai orientasi ekonomi Jepang yang condong ke Asia Tenggara salah satunya Indonesia).

Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata yang mulai dirintis oleh Jepang, terdapat tiga tahapan yang dilalui yaitu penekanan Pemerintah Jepang untuk para penduduknya yang diharuskan melakukan perjalanan wisata domestik. Pada saat itu, promosi yang di jalankan Jepang adalah wisata edukasi yang ditujukan pada para siswa sekolah Jepang. Sekolah-sekolah tersebut diwajibkan untuk satu tahun sekali melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat bersejarah di sana, dengan begitu sektor pariwisata Jepang pun mulai terasa perkembangannya. Jepang sendiri pada saat itu mulai memperbaiki sarana umum yang ada dinegaranya, seperti alat transportasi, dan hotel. Dengan adanya perbaikan sarana umum, terdapat beberapa warga negara asing yang mulai tertarik untuk mengunjungi Jepang. Tercatat sebanyak 352.832 orang asing yang datang pada tahun 1964, lalu bertambah lagi menjadi 1.316.632 orang pada tahun 1980, hingga pada tahun 1990 menjadi 3.235.860 warga negara asing. Meski adanya pertambahan jumlah kunjungan, namun pada tahun 1980 hingga 1990, Negeri Sakura ini tercatat sebagai negara yang hanya aktif dalam menyumbangkan angka wisatawan ke negara lain saja dan masih menerapkan *Outbound Tourism*. Namun keadaan tersebut berubah kembali saat Perdana Menteri Jepang, Koizumi

menerapkan beberapa kebijakan untuk mempermudah para warga negara asing yang ingin berkunjung ke Jepang pada 2002, hingga keadaan pariwisata Jepang mulai menjadi *Inbound Tourism*.

Terdapatnya doktrin Fukuda yang mengarah pada orientasi ekonomi di Asia Tenggara, pada tahun 1958, menjadikan sebuah hal baru untuk Indonesia dan Jepang, yang mana pada tahun itu terjalinlah hubungan bilateral antar kedua negara, dan terdapat adanya penanda tangunan perjanjian pampasan perang. Hubungan bilateral yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia terjadi sangat dinamis yang mengakibatkan hubungan keduanya sampai pada tahap Mitera Setrategis. Hubungan Jepang dengan Indonesia pada sektor ekonomi menitik beratkan pada investasi, perdagangan, dan kerjasama bantuan ekonomi (ODA). Tidak hanya pada kerja sama ekonomi saja, hubungan Jepang dengan Indonesia pun berkembang hingga pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata menarik untuk diulas karena latar belakang Jepang yang merupakan negara dengan sistem tertutupnya, hingga kemudian mulai membuka diri pada negara-negara luar. Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam sektor pariwisata tersebut terjalin pada tahun 2003, ketika Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Puteri menandatangani perjanjian kerjasama tersebut di Jepang. Setelah adanya kerjasama antar kedua negara dalam sektor pariwisata, Jepang pun memberikan beberapa kebijakan yang mempermudah warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Jepang, mulai dari *Multiple Visa* hingga kebijakan bebas visa.

Ketika pengembangan sebuah sektor pariwisata, tidak dapat terlepas dari yang namanya Visa. Karena visa merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan sebuah perjalanan ke luar negeri. Jepang sendiri, dalam memberlakukan kebijakan visa dinegaranya memiliki sebuah prosedur

yang sangat panjang, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah perdagangan manusia dan masuknya teroris. Namun stagnasi yang dialami Jepang selama kurang lebih 20 tahun, mengakibatkan tercetus sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe II, dalam pengembangan sektor pariwisatanya melalui kebijakan *Abenomic Growth Strategy*. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa kebijakan lain mengenai pengembangan sektor pariwisata Jepang. Hingga memunculkan sebuah kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2014 dengan syarat *E-Passport* dan hanya untuk tujuan wisata.

Kepentingan Rasional negara Jepang merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi pemberian kebijakan bebas visa terhadap beberapa negara terkhusus Indonesia. Dengan kebijakan bebas visa yang diberikan oleh Jepang, dapat terealisasikan beberapa kepentingan rasionalnya dalam mengoptimalkan hasil, seperti bertambahnya warga negara asing yang berkunjung ke Jepang. Yang mana, Jepang berambisi untuk meraih 20 juta warga negara asing yang berkunjung ke negaranya pada tahun 2020, namun sebelum tahun 2020, tepatnya pada tahun 2016 Jepang telah mencapai target yang diinginkan, bahkan hasilnya dapat melampaui, hingga sebesar 24.039.700 juta. Terdapat perbedaan yang signifikan pula terhadap jumlah kunjungan warga negara Indonesia sebelum hingga sesudah kebijakan bebas visa diberlakukan. Sebelum bebas visa, tercatat 136.797 orang yang berkunjung, namun setelah diberlakukan kebijakan bebas visa pertambahan wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang mencapai hingga 271,014 orang pada tahun 2016. Kepentingan aktor Rasional Jepang selanjutnya adalah adanya pertambahan pendapatan melalui warga negara asing yang berkunjung, untuk pertambahan pendapatan GDP Jepang, meski sektor pariwisata hanya menyumbang 2,4%

dari GDP, namun hasil tersebut juga berperan dalam menambah pendapatan ekonomi domestik Jepang yang mencapai hingga ¥ 12,013 miliar pada tahun 2016. Warga negara Indonesia pun ikut andil dalam sektor pariwisata Jepang dalam membelanjakan uangnya hingga mencapai ¥ 37 miliar tercatat pada tahun 2016. Dalam pertambahan sektor ekonomi Jepang, terdapat pula peningkatan investasi yang dilakukan negara Jepang di Indonesia pada sektor pertanian melalui bidang pembuatan teknologi irigasi. Selain dua kepentingan rasional Jepang diatas, alasan lain pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia, juga untuk merekatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Dengan Jepang yang memulai untuk memberlakukan kebijakan bebas visa tersebut untuk Indonesia tahun 2014. Kemudian pada Juni 2015, Pemerintah Indonesia pun merespon dengan baik hingga memberlakukan kebijakan yang sama untuk warga negara Jepang yang ingin berkunjung ke Indonesia tanpa harus mengaplikasikan visa dengan tujuan singkat dan tidak boleh lebih dari 30 hari tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jamil, Aditya. 2014. “*Motivasi Pemerintah Jepang dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia*”. JOM FISIP, Vol.2 No.2
- Agustinus, Michael. 2015. “1.100 Pengusaha Jepang Sambangi Jokowi, BKPM Bukti RI Mitra Penting” diakses di <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3078925/1100-pengusaha-jepang-sambangi-jokowi-bkpm-bukti-ri-mitra-penting>
- Armenia Resty. 2015. “Jokowi Temui 1.000 Turis Jepang” diakses di <https://m.cnnindonesia.com/nasiona>
- 1/20151123204516-20-93583/jokowi-temui-1000-turis-jepang
- Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakses di <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita-utama/754-ini-45-negara-yang-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia>
- JNTO Japan National Tourism Organisation. “*Japan Tourism Statistic*” diakses di <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition>
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia,” *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*” diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia” diakses di <https://www.kemlu.go.id/beijing/Layanan%20Visa/Bebas%20Visa%20Kunjungan.pdf>
- Kompas. 2013. “*Bebas Visa Jepang untuk Thailand dan Malaysia, Bukan Indonesia*” diakses di <https://travel.kompas.com/read/2013/06/27/1527262/Bebas.Visa.Jepang.untuk.Thailand.dan.Malaysia.Bukan.Indonesia>
- Mas’oed Mochtar. 1990. “*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*” (Jakarta: PT. Ikar Mandiriabadi, hal 275-276.
- Masrifah Harmayani, Alviana. 2015. “*Jepang Tawarkan RI Kerja Sama Pariwisata-Pertanian*” diakses di <https://ekbis.sindonews.com/read/1063925/34/jepang-tawarkan-ri-kerja-sama-pariwisata-pertanian-1448292542>

- Nusantara, Gelora. 2015. "Belajar dari Penerapan Bebas Visa Jepang bagi Warga Negara Indonesia" diakses di <https://www.kompasiana.com/genu-sa/552c240b6ea834495f8b4605/belajar-dari-penerapan-bvks-jepang-bagi-warga-negara-indonesia>
- Praditya Istianur, Ilyas. 2015. "Jepang Tawarkan Kerja Sama Pertanian ke RI" diakses di <https://m.liputan6.com/amp/2373399/jepang-tawarkan-kerja-sama-pertanian-ke-ri>
- Pratama Fajar. 2015. "Indonesia Berikan Bebas Visa Kunjungan ke 45 Negara ini" diakses di <https://m.detik.com/news/berita/2940933/indonesia-berikan-bebas-visa-kunjungan-ke-45-negara-ini?9922022>
- Rastika Icha. 2015. "Juni WN Jepang Bebas Visa ke Indonesia" diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/14434711/Juni.WN.Jepang.Bebas.Visa.ke.Indonesia>
- Setyo Adji, Hery. 1997. "Proses Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Historis Komparasi antara Indonesia Dan Jepang". JEP Vol. 2 No. 3
- Sayidiman, Suryohadiprojo. 1987. "Belajar dari Jepang Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup", UI-PRESS, hal 83
- Stefanie, Christie. 2017. "Jepang Kucurkan 74 Miliar Yen Untuk Irigasi dan Konservasi", 2017 diakses di <https://m.ccindonesia.com/nasional/20170115204959-20-186447/jepang-kucurkan-74-miliar-yen-untuk-irigasi-dan-konservasi>
- Tempo.co "Indonesia-Jepang Tandatangani Kerjasama Pariwisata" diakses di <https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata/full?view=ok>
- Tri Basuki, Agus; Prawoto Nano. 2015. "Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro", Yogyakarta Danisa Media
- "1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pariwisata di Jepang-ETD UGM" (SKRIPSI) diakses di <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/111474/potongan/S1-2017-335714-introduction.pdf>
- "Bebas Visa dengan Sistem Registrasi Pra-keberangkatan bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspor" diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_waiver2018.html
- "Foreign Visitors to Japan 2013", diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2013.pdf>
- "Foreign Visitors to Japan 2014", diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2014.pdf>
- "Foreign Visitors to Japan 2015", diakses di <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2016.pdf>
- "Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia", diakses di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/informasi-penting/Pages/Bebas-Visa-ke-Jepang-Berlaku-Efektif-1-Desember-Ini.aspx>

“Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai”, diakses di <https://ngurahrai.imigrasi.go.id/read/bebas-visa-kunjungan>

“Japan: Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors from 2006 to 2016” diakses di <https://www.statista.com/statistics/270093/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-japan/>

“Japan Tourism Agency” diakses di <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryu/whitepaper.html>

“Travel & Tourism Economic Impact 2017” diakses di <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/japan2017.pdf>

“Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2014” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001211777.pdf>

“Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2015” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001141408.pdf>

“Visitor from Indonesia impact to Japan’s Economic 2016” diakses di <http://www.mlit.go.jp/common/001255530.pdf>